



PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, JUMLAH POPULASI, DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2007-2024 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Bayu Maulana¹ Dimas Pratomo² Okta Supriyaningsih³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung^{1,2,3}

Email : mubay565@gmail.com¹

dimaspratomo@radenintan.ac.id²

oktasupriyaningsih@radenintan.ac.id³

Abstrak	Article info
<p><i>Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Persoalan ketimpangan punya makna yang lebih dari sekedar deretan angka. Hal itu berhubungan erat dengan masalah keadilan, keterbukaan informasi, serta pemerataan kesempatan dan akses dari sebuah proses perubahan yang bernama pembangunan. Penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan pada berbagai daerah adalah adanya perbedaan komposisi penduduk, sumber daya yang ada, karakteristik berbagai daerah, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi dana pembangunan antar daerah serta perbedaan kondisi demografis. Ketimpangan pendapatan yang terjadi di perkotaan dan di pedesaan salah satunya karena ketersediaan lapangan kerja di sektor primer lebih banyak terdapat di kota dibandingkan di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan upah minimum provinsi terhadap ketimpangan pendapatan asli daerah di Provinsi Banten tahun 2007-2024 dalam perspektif ekonomi Islam. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dalam bentuk data time series. Data Time Series dalam penelitian ini menggunakan data 18 tahun terakhir yakni tahun 2007-2024. Sedangkan Cross Section pada penelitian ini menggunakan 1 provinsi yaitu Provinsi Banten. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. Pemilihan model regresi dan uji prasyarat analisis dengan menggunakan alat analisis data yaitu EViews versi 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel produk domestik regional bruto (X1) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan asli daerah di Provinsi Banten tahun 2007-2024, lalu jumlah populasi/penduduk (X2) tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten tahun 2007-2024, kemudian juga upah minimum provinsi (X3) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan asli daerah di Provinsi Banten tahun 2007-2024. Secara bersamaan variabel produk domestik regional bruto, jumlah populasi/penduduk dan upah minimum provinsi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan asli daerah di Provinsi Banten tahun 2007-2024.</i></p>	<p>Diajukan: 28-3-2025 Diterima: 02-5-2025 Diterbitkan : 25-05-2025</p> <p>Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Populasi, Upah Minimum Provinsi</p> <p>Keywords: Regional Income Inequality, Gross Regional Domestic Product, Population Size, Provincial Minimum Wage</p>
<p>Abstract</p> <p><i>Income inequality is a common phenomenon in Indonesian society. The issue of inequality goes beyond mere numbers. It is closely related to issues of justice, information transparency, and equal opportunities and access to the process of change known as</i></p>	

development. The causes of income inequality in various regions are differences in population composition, available resources, regional characteristics, the concentration of regional economic activity, the allocation of development funds between regions, and differences in demographic conditions. Income inequality between urban and rural areas is partly due to the greater availability of primary sector jobs in cities than in villages. This study aims to determine the influence of gross regional domestic product, population, and provincial minimum wage on regional income inequality in Banten Province from 2007 to 2024 from an Islamic economic perspective. The data analysis method used in this study is descriptive analysis with a quantitative approach in the form of time series data. Time Series data in this study uses data from the last 18 years, namely 2007 to 2024. While the Cross Section in this study uses 1 province, namely Banten Province. The type of data used is secondary data taken from the official website of the Central Statistics Agency (BPS) of Banten Province. The selection of regression models and analysis prerequisite tests using data analysis tools, namely EViews version 10. The results of this study indicate that the gross regional domestic product (X1) partially influences regional income inequality in Banten Province from 2007 to 2024. Population size (X2) has no effect on income inequality in Banten Province from 2007 to 2024. Furthermore, the provincial minimum wage (X3) also influences regional income inequality in Banten Province from 2007 to 2024. Concurrently, the gross regional domestic product, population size, and provincial minimum wage influence regional income inequality in Banten Province from 2007 to 2024.

Cara mensitasi artikel:

Maulana, B., Pratomo, D., & Supriyaningsih, O. (2025). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Populasi, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Banten Tahun 2007-2024 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 3(3), 301-312. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN>

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Persoalan ketimpangan punya makna yang lebih dari sekedar deretan angka. Hal itu berhubungan erat dengan masalah keadilan, keterbukaan informasi, serta pemerataan kesempatan dan akses dari sebuah proses perubahan yang bernama pembangunan. Penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan pada berbagai daerah adalah adanya perbedaan komposisi penduduk, sumber daya yang ada, karakteristik berbagai daerah, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi dana pembangunan antar daerah serta perbedaan kondisi demografis. Kondisi demografis akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan, contohnya adalah perbedaan tingkat pertumbuhan, struktur kependudukan, tingkat pendidikan dan kesehatan, serta tingkah laku dan kebiasaan kerja yang mampu menarik aktivitas ekonomi penduduk. Newman dan Banerjee mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat menyebabkan ketimpangan yang tinggi.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang

merata. Pada banyak negara berkembang masalah ketimpangan merupakan topik yang sangat menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan topik tersebut berkaitan dan memberikan dampak terhadap yang lainnya. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tujuan dari usaha pembangunan ekonomi juga menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran.

Masalah kemiskinan tidak cukup dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi saja, karena ketika terjadi peningkatan PDRB yang tinggi namun tidak diikuti dengan persebaran pendapatan yang merata maka akan memunculkan masalah baru yaitu masalah ketimpangan pendapatan yang berdampak pada semakin terjerumusnya masyarakat miskin ke dalam lingkaran kemiskinan sedangkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati golongan masyarakat pendapatan tinggi atau kaya.

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di perkotaan dan di pedesaan salah satunya karena ketersediaan lapangan kerja di sektor primer lebih banyak terdapat di kota dibandingkan di desa. Pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian upah minimum setiap tahunnya dan meninjaunya secara berkala. Kepentingan pekerja dan kemampuan pengusaha dalam membayar upah adalah aspek yang menjadi bahan pertimbangan utama pemerintah dalam menetapkan besarnya kenaikan upah minimum. Selain itu, kenaikan upah minimum diharapkan mampu memperbaiki tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang ada.

Ketimpangan distribusi pendapatan memiliki dampak yang besar sehingga pemerintah pusat dan daerah harus saling bekerja sama memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Oleh sebab itu, kajian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan sangatlah diperlukan salah satu metode pengukuran tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah adalah Koefisien Gini, yang umumnya disebut sebagai gini ratio. Gini ratio merupakan indikator numerik yang mengukur sejauh mana ketimpangan pendapatan terdistribusi, dengan rentang nilai antara 0 (paling merata) hingga 1 (paling tidak merata). Gini ratio dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ketimpangan rendah (0 - 0,3), ketimpangan menengah (0,3 - 0,5), dan ketimpangan tinggi (di atas 0,5). Ketimpangan di kabupaten/kota di Provinsi Banten yang diwakili oleh rasio gini menunjukkan bahwa daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten berada pada pemerataan dengan level menengah. Ketimpangan pendapatan pada Wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Ketimpangan yang terjadi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan krisis finansial. Tujuan dilakukannya pemerataan pendapatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi yang merata. Peningkatan kesejahteraan dapat diukur dari kenaikan tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, harus membandingkan pendapatan riil daerah yang bersangkutan, dengan PDRB sebagai indikator yang digunakan.

Dalam tahap awal pembangunan ekonomi disparitas dalam distribusi pendapatan akan membesar dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang pada awalnya sudah relatif maju, misalnya dalam pembangunan industri, infrastruktur dan sumber daya

manusia. Kemudian pada tahap pertumbuhan yang lebih besar terjadi konvergensi dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan mengalami penurunan. Sepanjang tahun 2007-2024 nilai PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Provinsi Banten mengalami peningkatan kecuali di tahun 2020 yang sempat menurun dikarenakan pandemi namun di tahun berikutnya mengalami kenaikan. Dapat dikatakan bahwa dalam periode tahun 2007-2024, di perekonomian Provinsi Banten terjadi pola hubungan yang bersifat positif antara peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan masyarakat. Artinya, ketika perekonomian mengalami peningkatan maka tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat juga meningkat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Secara sederhana pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi di bagi menjadi 3 komponen penting, pertama adalah akumulasi modal, kedua adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi. Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah populasi penduduk terbanyak di dunia. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu membawa dampak positif sekaligus negatif bagi perekonomian suatu daerah. Dapat berdampak positif ketika peningkatan populasi penduduk diimbangi dengan kesempatan kerja atau lapangan kerja yang banyak. Ketika peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang dibutuhkan maka akan membawa dampak negatif bagi perekonomian.

Peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan ketimpangan regional. Meningkatnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah akan menyebabkan menurunnya pendapatan per kapita. Meningkatnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah dapat meningkatkan perekonomian apabila diikuti dengan meningkatnya produktivitas. Namun apabila meningkatnya jumlah penduduk tidak didukung dengan peningkatan produktivitas akan menyebabkan pengangguran dan kemiskinan di wilayah tersebut. Sehingga peningkatan jumlah penduduk dapat menghambat proses pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan masalah ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan penduduk biasanya memicu timbulnya masalah lain seperti struktur umur muda, jumlah pengangguran yang semakin lama semakin tinggi, urbanisasi dan lain sebagainya. Masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah, maupun daerah pedesaan dan daerah perkotaan, serta antar sektor.

Jumlah penduduk Provinsi Banten terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2019-2023. Meskipun sempat terjadi penurunan di tahun 2020 dikarenakan pandemi namun di tahun berikutnya kembali meningkat. Perkembangan penduduk yang kian bertambah cepat dan jumlahnya yang sangat besar dalam beberapa dasawarsa ini,

menimbulkan beberapa masalah baru yang sangat serius. Masalah-masalah tersebut adalah :

- a. Struktur penduduk yang berat sebelah, yaitu banyaknya penduduk yang berada dibawah umur (dibawah 15 tahun)
- b. Pengangguran yang bertambah serius, dan
- c. Arus urbanisasi yang tinggi.

Masing-masing masalah ini mempersulit usaha negara berkembang mempercepat proses pembangunan ekonomi. Dan hal tersebut dapat pula menyebabkan ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan yang muncul terkait kependudukan tidak hanya terbatas pada jumlah yang banyak semata akan tetapi ada masalah lain di bidang kependudukan yaitu kualitas sumber daya manusia/penduduk, persebaran penduduk, tingkat konsumsi dan lain sebagainya. Pertumbuhan penduduk sebenarnya merupakan keseimbangan dinamis antara dua kekuatan yang menambah atau yang mengurangi jumlah penduduk. Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang baru lahir tetapi di sisi lain akan berkurang oleh kematian pada semua tingkatan usia. Dalam konteks spasial mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk, dimana imigrasi akan menambah jumlah penduduk dan emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan selain jumlah penduduk yaitu kebijakan upah minimum. Upah minimum dapat mengurangi ketimpangan pendapatan karena menghasilkan penyerapan tenaga kerja yang tinggi dengan kondisi pasar yang kompetitif. Upah minimum merupakan kebijakan yang bermanfaat untuk memastikan pekerja mendapatkan upah yang wajar sekaligus mencegah kemiskinan dikalangan pekerja yang mencakup pemenuhan standart kebutuhan hidup buruh. Lebih jauh, pendistribusian kembali penghasilan pekerja pada skala gaji terendah menurunkan dispersi upah dan kemungkinan akan meningkatkan permintaan agregat melalui efek multiplier.

Di banyak negara upah minimum adalah hal utama dalam penetapan upah nasional. Mereka tidak hanya menyediakan batasan upah secara umum, tetapi juga mempengaruhi upah, menaikkan tingkat pendapatan dan memiliki dampak penting pada dispersi upah keseluruhan. Mereka yang bekerja di sektor formal adalah target kebijakan upah minimum. Mereka tidak menerima upah di bawah upah minimum karena peraturan tersebut. Ini menjadi suatu keharusan bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan jika tidak akan dikenakan denda. Oleh karena itu, upah minimum tidak hanya alat untuk melindungi pekerja di bagian bawah skala upah tetapi sering menjadi "isu-kelas menengah". Pada saat yang sama, upah minimum harus digunakan dengan hati-hati sebagai instrumen antikemiskinan karena dampaknya tergantung pada distribusi lapangan kerja ditingkat rumah tangga. Akibatnya, mereka tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat upah pada target grup tertentu. Keseimbangan harus dipastikan ketika menetapkan upah minimum. Jika ditetapkan terlalu rendah, mungkin kehilangan targetnya. Ketika itu terlalu tinggi dari nilai upah rata-rata, mungkin mencegah perusahaan mempekerjakan pekerja berketerampilan rendah atau mendorong mempekerjakan mereka secara informal.

Upah minimum di Indonesia ditentukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten, yang bervariasi menurut provinsi, kabupaten, dan sektor. Upah minimum di provinsi

banten sendiri bervariasi dari angka tertinggi di tahun 2024 yaitu Rp 2.727.812 per bulan hingga angka terendah yaitu Rp 746.500 per bulan di tahun 2007. Upah minimum menyebabkan, non-pasar, berperan menentukan batas minimum upah di pasar tenaga kerja, yang meningkatkan harga tenaga kerja. Dengan meningkatnya harga tenaga kerja, upah minimum menghasilkan pengurangan permintaan tenaga kerja dan sebagian pekerja akan menjadi pengangguran. Dalam undang-undang upah minimum merupakan faktor penting dan relevan memberikan kontribusi untuk memperlambat ketimpangan upah antara bagian atas dan bawah dari distribusi upah dan pendapatan di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode dengan landasan filsafat *positivisme*, dapat digunakan untuk mengetahui secara mendalam tentang populasi atau sampel tertentu, sampel yang diambil biasanya dilakukan dengan acak, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh data dari produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, upah minimum provinsi dan gini ratio di Provinsi Banten. Sampel dalam penelitian ini adalah data produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, upah minimum provinsi dan gini ratio di Provinsi Banten selama periode 2007-2024.

Penelitian mengenai pengaruh produk domestik regional bruto, jumlah populasi, dan upah minimum provinsi terhadap ketimpangan pendapatan asli daerah di provinsi Banten, menggunakan data time series selama 18 tahun mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2024 dengan jumlah observasi sebanyak 18 observasi.

Analisis ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan model kerja yakni Ketimpangan Pendapatan asli daerah = f (Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Populasi, dan Upah Minimum Provinsi), maka persamaan regresi liniernya adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 \text{ et}$$

Keterangan:

Y : Ketimpangan PAD Provinsi Banten tahun 2007- 2024

X1 : PDRB Provinsi Banten tahun 2007-2024

X2 : Jumlah populasi Provinsi Banten tahun 2007-2024

X3 : Upah Minimum Provinsi Banten tahun 2007-2024

β_0 : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Parameter

Uji asumsi klasik dilakukan agar hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinieritas, normalitas, autokolerasi dan heteroskedastisitas. Model regresi ini digunakan agar dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) yakni tidak terdapat multikolinieritas, autokolerasi, normalitas dan heteroskedastisitas.

Uji signifikansi secara parsial atau uji-t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tak bebas. Pengujian terhadap masing-masing koefisien regresi parsial dengan menggunakan uji t

apabila besarnya varians populasi tidak diketahui, sehingga pengujian hipotesisnya sangat ditentukan oleh nilai-nilai statistiknya.

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara keseluruhan dilakukan dengan uji F. Kesimpulan uji F dapat diperoleh dengan membandingkan antara F statistik dengan F tabel pada tingkat tertentu dan derajat bebas tertentu.

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan kemampuan variabel-variabel bebasnya dalam menjelaskan perubahan variabel tak bebasnya. Nilai koefisien determinasi yang baik adalah yang semakin mendekati 1, karena akan berarti kesalahan pengganggu dalam model yang digunakan semakin kecil. Dua sifat R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$, artinya nilai R^2 terletak pada $0 \leq R^2 \leq 1$, suatu nilai R^2 mendekati 1 yang artinya modelnya semakin baik. Apabila nilai dari R^2 sebesar 1 berarti kemampuan variabel-variabel bebasnya mampu menjelaskan secara sempurna perubahan variabel tak bebasnya. Sebaliknya jika nilai dari R^2 sebesar 0 berarti variabel-variabel bebasnya tidak mampu menjelaskan perubahan variabel tak bebasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Seberapa besar pengaruh pengaruh produk domestik regional bruto, jumlah populasi, dan upah minimum provinsi terhadap ketimpangan pendapatan asli daerah di provinsi banten tahun 2007-2024

Dalam uji coba nilai koefisien determinasi (R^2) penelitian ini mendapatkan nilai sebesar 63,6157%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independent yang terdiri dari PDRB, Jumlah Populasi, UMP mampu menjelaskan variabel ketimpangan pendapatan asli daerah sebesar 63,6157%, sedangkan sisanya 36,3843% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. **Pengaruh**

a. Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten Tahun 2007-2024

Berdasarkan hasil penelitian, koefisien regresi untuk variabel produk domestik regional bruto menunjukkan tanda positif, yakni sebesar 0,039154. Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh variabel produk domestik regional bruto terhadap ketimpangan pendapatan asli daerah di provinsi Banten menunjukkan angka yang signifikan.

Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-statistic variabel produk domestik regional bruto (X_1) sebesar 3,072418 lebih besar daripada nilai t-tabel sebesar 2,145, dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan asli daerah. Hal ini berarti bahwa dengan kenaikan produk domestik regional bruto sebesar 1%, maka akan berakibat pada kenaikan nilai ketimpangan pendapatan sebesar 0,039154 % dengan asumsi ceteris paribus.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh T. M. Pasya Athallah, Nugroho Suryo Bintoro dengan judul Pengaruh PDRB, Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Regional. Hasil estimasi menunjukkan nilai koefisien dari variabel PDRB yang bernilai positif yang menandakan bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan regional.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan & Sugiyanto, 2013) dan (Ika Wahyuntari & Pujiati, 2018) dimana hasil dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang cenderung lebih besar akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, akan tetapi akan berdampak kepada wilayah lainnya yang relatif lebih rendah dalam hal daya produktivitas sehingga akan menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut dan mendorong angka pengangguran dan kemiskinan yang pada akhirnya menambah angka ketimpangan antar wilayah.

Jika secara teori hubungan antara PAD dan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan fungsi dari PDRB. Dimana semakin meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan melalui pajak dan retribusi daerah.

b. Pengaruh Jumlah Populasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten Tahun 2007-2024

Berdasarkan hasil penelitian, koefisien regresi untuk variabel jumlah populasi menunjukkan tanda positif, yakni sebesar 0.014024. Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh variabel jumlah populasi terhadap ketimpangan pendapatan asli daerah di provinsi Banten menunjukan angka yang tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-statistic variabel jumlah populasi (X_2) sebesar 1,256415 lebih kecil daripada nilai t-tabel sebesar 2,145, dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian jumlah populasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan asli daerah di provinsi Banten, hal ini berarti bahwa dengan kenaikan 1% maka akan berakibat pada kenaikan nilai ketimpangan pendapatan asli daerah sebesar 0,014024%

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh LM. Harafah, M. Yani Balaka, Hasan Aedy, Fajar Saranani, Wali Aya Rumbia dengan judul Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hasil uji hipotesis parsial tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil tersebut sesuai dengan hasil kajian empirik sebelumnya yaitu Nadhifah & Wibowo (2021) dan Triarsa & Purbadharmaja (2021) yang mengatakan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak akan menimbulkan masalah jika produktivitas penduduknya juga tinggi sehingga tidak menyebabkan distribusi pendapatan timpang. Permasalahan akan muncul jika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang berakibat pada ketimpangan distribusi pendapatan.

Hubungan teori stewardship dengan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah yaitu pihak-pihak berkepentingan dapat mengatur laju pertumbuhan penduduk dengan pengambilan kebijakan yang tepat, agar jumlah penduduk dapat dikendalikan dan memiliki kualitas yang baik, penduduk dengan kualitas yang baik dapat meningkatkan nilai produksi sehingga pendapatan yang diperoleh lebih besar. Ketika pendapatan penduduk besar tingkat konsumsi akan semakin besar hal ini akan

berpengaruh terhadap perkembangan usaha disekitar dan penerimaan pajak. Dengan semakin besar suatu usaha pajak yang harus dibayar semakin besar dimana akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

c. Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten Tahun 2007-2024

Berdasarkan hasil penelitian, koefisien regresi untuk variabel upah minimum provinsi menunjukkan tanda negatif yakni sebesar $-0,063085$. Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh variabel upah minimum provinsi terhadap ketimpangan pendapatan asli daerah di provinsi Banten menunjukkan angka yang tidak signifikan, hal ini ditunjukkan oleh nilai t-statistic variabel UMP (X3) sebesar $-2,149853$ lebih besar daripada nilai t-tabel sebesar $-2,145$, dan nilai probabilitas dari variabel upah minimum provinsi ini sebesar $0,0495$ dimana nilai probabilitasnya lebih kecil dari $0,05$. Dengan demikian UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairul Raziq, Lak lak Nazhat El Hasanah dengan judul analisis determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil analisis data yang telah dilakukan menemukan variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil tersebut memberi tanda peningkatan maupun penurunan besaran UMK memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan yang ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai koefisien variabel UMK sebesar $-0,047961$ bermakna bahwa setiap kenaikan UMK sebesar 1 persen akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar $0,047961$ persen.

Temuan pada studi ini sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Rahman & Putri (2021) dimana upah minimum diklaim berpengaruh karena dapat mendorong daya konsumsi masyarakat dan mampu mengeskalasi sisi permintaan barang dan jasa regional. Lebih lanjut, ketimpangan pendapatan juga dapat diperbaiki melalui peningkatan upah. Melalui hal itu, setiap orang yang bekerja diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkonsumsi lebih dari pendapatan sebelumnya (Maurizio & Varquez, 2016)

2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten tahun 2007-2024.

Berdasarkan hasil regresi, untuk variable produk domestik regional bruto, jumlah populasi, dan upah minimum provinsi secara Bersama sama menunjukkan angka yang positif yakni $8,159392$. Berdasarkan uji signifikansi uji f, variabel produk domestik regional bruto, jumlah populasi, dan upah minimum provinsi secara Bersama sama menunjukkan angka yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan asli daerah diprovinsi Banten tahun 2007-2024, hal ini ditunjukkan oleh nilai f-statistic yakni $8,15$ yang mana nilai tersebut lebih besardaripada f-tabel yaitu $3,41$, dengan demikian variabel PDRB, Jumlah Populasi, dan UMP secara bersama sama

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan asli daerah di provinsi Banten.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah, termasuk pengaruhnya terhadap ketimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PDRB memiliki variasi pengaruh terhadap ketimpangan PAD

Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD dapat disebabkan rendahnya pendapatan masyarakat. Rendahnya pendapatan membuat permintaan agregat atas barang rendah yang berdampak pada perusahaan akan mengurangi total produksinya dan mengurangi tenaga kerjanya, sehingga peningkatan jumlah penduduk tidak meningkatkan PAD. Selain itu, juga disebabkan penduduk kebanyakan masih berpenghasilan rendah dan masih ada yang acuh terhadap pajak.

Pertumbuhan penduduk dapat memberikan efek yang tidak baik terhadap ketimpangan pendapatan. Menurut Todaro & Smith (2003) ketimpangan pendapatan di negara yang sedang berkembang disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita, ketidakmerataan pendapatan, inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang dan investasi. Pada kenyataannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini karena pertumbuhan jumlah penduduk dinilai bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Penduduk jika diibaratkan pelaku dapat menjadi sumber bagi faktor produksi. Jika produktivitas setiap penduduk tinggi maka akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan juga mampu mendorong angka ketimpangan pendapatan semakin mengecil.

Upah minimum redistribusi pendapatan dengan menurunkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan upah pekerja terendah. Dengan demikian, dengan menetapkan upah minimum maka standar upah akan lebih tinggi dan menciptakan distribusi upah dan pendapatan yang lebih adil. Pada kenyataannya upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten Tahun 2007-2024 Dalam Perspektif Ekonomi Islam, sehingga di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan asli daerah di provinsi Banten tahun 2007-2024.
2. Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan asli daerah di Provinsi Banten tahun 2007-2024.

3. Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan asli daerah di Provinsi Banten tahun 2007-2024
4. Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum Provinsi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan asli daerah di Provinsi Banten tahun 2007-2024, kemudian dalam hasil uji determinasi (R^2) variabel bebas memiliki nilai 0,63 atau 63% artinya variabel bebas mampu menjelaskan terhadap variabel terikat sebesar 63% selama periode tahun 2007-2024.
5. Dalam perspektif ekonomi Islam ketimpangan pendapatan asli daerah di Provinsi Banten perlu dievaluasi melalui prinsip-prinsip keadilan (adl), keseimbangan (tawazun), dan pemerataan (musawah). Ketimpangan dalam distribusi PAD dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diharuskan dalam Islam. Kesejahteraan umat harus merata dan tidak boleh ada kesenjangan signifikan antara daerah yang satu dengan yang lainnya, karena hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pemerataan PAD di Provinsi Banten penting untuk menciptakan keadilan dan mendukung pembangunan yang inklusif, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Widarjono. 2018. *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Edisi kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Arsyad, L. (2022). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPM
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Br Arfida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007). h.150
- Eny Rochaida, "Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur", Vol. 18 No. 1 (2016) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, h. 14.
- Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter. *Dasar-Dasar Ekonometrika*;
- Hanum, N., & Sarlia, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Konsumsi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 84-92.
- Ibid.
- Ibid., h. 150-151
- International Labour Organization (ILO). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sarana untuk Produktivitas*. 2013;
- Iswanto, Denny. (2015). Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Timur, Vol.4 N0.1, April 2015. Tangerang Selatan.
- Lm. Harafah, M. Yani Balaka, Hasan Aedy, Fajar Saranani, Wali Aya Rumbia, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara," *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (Jpep)* Volume 7, Nomor 2. Tahun 2022 Page: 234-244.

- Novri Silastri, "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan," *JOM Fekon* 4, no. 1 (2017): 105–17.
- Nurfifah, R., Walewangko, E. N., & Masloman, I. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Ketimpangan Kota-Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmu Efisiensi*, 22(5), 25–36.
- Paramita, Rastri. (2021). "Menilik Upah Minimum Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia". *Jurnal Budget* Vol. 6, No. 2, 2021
- Sadono, Sukirno. 2016. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sjafrizal, 2018. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Baduouse Media, Cetakan Pertama. Padang.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Penerbit Alfabeta, 2018).
- Sukirno, Sadono. (2006). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.).
- Sungkar, Sari N. Dkk (2015). "*Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia*". *Jurnal Ilmu Ekonomi* ISSN 2302-0172 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 3, No. 2, Mei 2015
- Suryamin.2016. *Statistik Indonesia Statistical Yearbook of Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia
- T. M. Pasya Athallah, Nugroho Suryo Bintoro, "Pengaruh Pdrb, Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Regional," *Journal Of Development Economic And Social Studies* Volume 2 No 2 Tahun 2023.
- Tambunan., 2011., *Teori Ekonomi Makro*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development*. Pearson UK.
- Todaro, Michael P, 2006. *Pembangunan Ekonomi: Di Dunia Ketiga* edisi 9, Jakarta: Penerbit Erlangga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar
- Todaro, Michael, P. dan Stephen C. Smith. 2013. *Pertumbuhan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga.